

PERKEMBANGAN PERKEBUNAN DAN MASALAH PANGAN DI SUMATERA TIMUR, 1870-1942

Oleh : Nur Hayati*

Pendahuluan

Akhir abad XIX bagi sejarah masyarakat Indonesia merupakan abad perubahan, yaitu berubahnya masyarakat Indonesia dari tradisional ke bentuk modern. Proses modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda telah mengakibatkan berbagai perubahan di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya terjadi karena diberlakukannya intensifikasi politik kolonial Belanda melalui proses birokratisasi, komersialisasi, industrialisasi, edukasi, inovasi dan renovasi teknologi pertanian yang berpengaruh besar bagi daerah-daerah di Indonesia. Renovasi teknologi pertanian ini membawa perubahan pada sektor kehidupan pertanian yang sistematis melalui kebijakan ekonomi ke arah produksi kapitalis.¹

Sekalipun perubahan dan pembaharuan itu terjadi terutama di pulau Jawa, namun hal tersebut merupakan awal bagi pembaharuan yang akan terjadi di beberapa bagian kepulauan Indonesia. Perubahan itu terutama terjadi karena munculnya undang-undang baru yang disebut dengan Undang-Undang Agraria atau lebih dikenal dengan *Agrarische Wet*.²

Ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut antara lain adalah orang asing dilarang mengambil alih tanah penduduk pribumi, namun diperbolehkan untuk menyewa tanah pertanian dalam jangka waktu 5 tahun. Ketentuan yang pertama bertujuan untuk mencegah timbulnya kekuasaan yang akan merampas hak milik atas tanah secara semena-mena. Sementara ketentuan kedua memberi jalan kepada pengusaha-pengusaha swasta untuk memakai tanah penduduk. Akan tetapi tanah dan tenaga kerja merupakan satu kesatuan, sehingga

mereka yang menguasai tanah itu dapat menggunakan tenaga penduduk secara sewenang-wenang. Dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa semua tanah yang bukan milik pribumi dinyatakan sebagai tanah *domein* (hak negara atas tanah). Tanah semacam ini disebut juga sebagai tanah bebas, sedangkan tanah yang dikuasai penduduk pribumi juga disebut tanah bebas.³

Sebagai akibat dari peraturan itu, ada kecenderungan menjadikan status tanah yang disewakan berubah sehingga berstatus milik yang menyewakan. Pemilikan tanah menjadi sebuah kegiatan politik yang menjamin keberhasilan para pemilik modal swasta menjalankan prakteknya mengusahakan kegiatan bisnis dalam bentuk agroindustri dengan rakyat Indonesia sebagai korbannya. Semua kebijaksanaan perundang-undangan terhadap tanah ditujukan bagi politik agraria pemerintah kolonial yang memberikan keuntungan sangat besar kepada pihak pemilik modal swasta. Kesemuanya itu berakibat pada sifat dari upaya penanaman modal swasta yang selalu mencari sasaran tanah dan memerlukan tenaga manusia yang cukup banyak serta murah. Penanaman modal selalu dikaitkan dengan upaya pencarian daerah yang tanahnya baik dan cukup banyak penduduknya, maka sejak tahun 1870 modal swasta mulai mengalir ke Jawa, tempat yang paling baik untuk eksploitasi kapitalis secara intensif, khususnya di sektor pertanian atau perkebunan.⁴ Produksi hasil-hasil tanaman yang berorientasi ekspor secara besar-besaran menjadi pokok perhatian utama pemerintah dan pengusaha swasta. Pola organisasinya, penentuan jenis tanaman serta lokasi penanaman sangat berubah selama kurun waktu 1830-1940, tetapi industri perkebunan sebagai keseluruhan tetap merupakan dasar utama perekonomian Indonesia.⁵

Pada tahun 1860, ekspor swasta dan pemerintah dari seluruh Indonesia kira-kira sama nilainya. Tetapi pada tahun 1885, ekspor swasta mencapai 10 kali lipat dari ekspor pemerintah. Ricklef menyebut periode "liberal" ini (sekitar 1870-1900) sebagai zaman semakin hebatnya eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian Jawa maupun luar Jawa.⁶ Kemajuan yang pesat ini berkaitan dengan perkembangan perkebunan di daerah luar Jawa. Pertumbuhan memang terjadi di berbagai tempat di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera Selatan, tetapi konsentrasi pengembangan ekonomi di luar Jawa adalah daerah Sumatera Timur. Daerah yang

*Alumnus Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

¹W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*, (The Hague/ Bandung: W. Van Hoeve, 1956), hlm. 38-50.

²Undang-undang ini lahir dari perdebatan panjang di parlemen Belanda antara golongan liberal dengan golongan konservatif tentang pemberian peran swasta di daerah jajahan. Perdebatan tersebut berakhir dan tercipta kompromi atas prakarsa Menteri Jajahan De Waal sehingga undang-undang ini sering disebut dengan *Het de Waal*. Baca Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, jilid 2, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 3-17.

³*Ibid.*, hlm. 25.

⁴W.F. Wertheim, *op. cit.*, hlm. 43.

⁵W.J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940", dalam Anne Booth (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 197.

⁶M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono H, (Yogyakarta: Gadjah Mada UP, 1991), hlm. 190.

pada tahun 1860-an masih berupa rimba raya yang tak terbatas, telah berubah menjadi daerah perkebunan terkemuka di dunia.

Pada pertengahan abad ke-19, daerah yang kemudian lebih dikenal sebagai Pantai Timur Sumatera itu masih merupakan hutan yang tidak dikenal dan terbelakang. Tidak mengherankan kalau pada waktu itu tidak ada seorang pun yang akan menduga bahwa daerah ini dalam waktu kurang dari setengah abad akan mengalami perkembangan yang demikian pesat sehingga orang menyebutnya dengan istilah "Amerika Hindia" (*Indies America*).⁸

John Anderson adalah orang pertama yang membuka mata dunia dengan hasil penjelajahannya yang ia tulis dan merupakan laporan kepada gubernur EIC (Perusahaan Hindia Timur Inggris) yang berkedudukan di Penang, *Mission to The East Coast of Sumatra in 1823*⁹ merupakan buku laporan Anderson yang mencakup uraian tentang perjalanannya secara terperinci dari hari ke hari, sejarah dan gambaran tentang Sumatera Timur antara Tanjung Intan dan Siak. Hal ini merupakan peristiwa penting dalam kepustakaan karena laporan ini merupakan data pertama yang sistematis mengenai geografi, ekonomi, etnologi dan politik dari berbagai negeri sepanjang pantai itu.

Belum setahun Anderson pulang dari Sumatera Timur, Perjanjian London pada tanggal 17 Maret 1824 ditandatangani. Inggris harus menyerahkan daerah kekuasaannya di daerah Sumatera kepada Belanda, sedangkan Belanda harus menyerahkan Malaka dan Goa di India sebagai gantinya. Demikianlah sehingga daerah Sumatera Timur yang potensial itu juga harus diserahkan kepada Belanda.

Masuknya pengaruh Belanda ke berbagai wilayah Indonesia biasanya memanfaatkan suatu pergolakan internal di daerah untuk mempasifikasikan dan menanam kekuasaan serta mengatur pemerintahannya. Di Sumatera Timur pada tahun 1850 timbul pergolakan yang memberi kesempatan kepada Belanda untuk menyusun pemerintahan secara langsung dengan taktik menjadi sekutu salah satu pihak dan kemudian menjalin perjanjian. Namun hal ini belum mendorong pemerintah kolonial Belanda mengembangkan potensi ekonomi daerah ini. Hal itu baru terjadi setelah seorang pekebun asal Belanda yaitu Jacobus Nienhuys, yang sebelumnya membuka perkebunan tembakau di Besuki pada tahun 1861, datang ke Sumatera Timur untuk memperluas usahanya di sana. Ia tertarik mengunjungi daerah Deli yang terletak di pantai timur Sumatera karena mendengar cerita dari

⁷W.J. O'Malley, *op. cit.*, hlm. 224. Lebih jelas baca buku T. Volker, *Van Oerbosch tot Cultuurgebied-Een Schets van de Beteekenis van de Tabak, de Andere Cultures, en de Industrie ter Oostkust van Sumatra*, (Medan: DPV & AVROS, 1928).

⁸Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra 1863-1942*, (Jakarta: LEKNAS-LIPI, LPSES, 1977), hlm. 1.

⁹John Anderson, *Mission to The East Coast of Sumatra in 1823*, (Kuala Lumpur: Oxford UP, 1971)

Sayid Abdullah Ibnu Umar Bilsagih yang mengatakan bahwa Deli adalah daerah penghasil tembakau yang potensial.

Dengan percobaan sederhana, Nienhuys membuka 75 ha perkebunan tembakau di Deli, dan muatan tembakau pertama tiba di Rotterdam pada bulan Maret 1864. Setelah pelbagai kesulitan dan kegagalan dapat diatasi, antara lain dengan dukungan perusahaan, seperti van den Arend dan Mathieu & Co. pada tahun 1865 dapat dikirim 189 bal tembakau. Untuk produksi itu Nienhuys telah mengerahkan tenaga Cina dari Singapura, sebanyak 120 orang. Diusulkannya investasi untuk membuka perkebunan kopi, coklat, dan kelapa, namun pada tingkat itu tidak ada yang dikabulkan. De Munnick sebagai pengganti Nienhuys, sejak tahun 1867 membuat kontrak untuk 99 tahun mencakup areal seluas 2000 ha.

Melihat keuntungan yang diperoleh Nienhuys dari perkebunan itu cukup menggiurkan, banyak pengusaha perkebunan Eropa lainnya tertarik untuk mengadu keuntungan di Sumatera Timur dan kemudian mereka "menyerbu" Deli. Untuk memperoleh tanah, para pengusaha perkebunan itu mendapatkannya dari Sultan Deli, Serdang dan Langkat.

Setelah berhasil mengumpulkan modal, Nienhuys kembali ke Sumatera Timur untuk membuka perkebunan yang terletak antara Sungai Deli dan Sungai Percut. Hasilnya, pada tahun 1868 usahanya itu telah memberi keuntungan 100% lebih, dari keuntungan itu kemudian terbentuklah Deli Maatschappij, suatu N.V. dengan modal yang separohnya dari *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM). Setelah itu kemudian banyak menyusul usaha seperti perkebunan Carlshure, Vesuvius, Catsburg, Hospitality, dan lain-lain. *Deli Maatschappij* memperluas diri, dan membuka perkebunan kopi (1880), coklat (1879-1884), rami (1879-1886), dan karet (1901). Daerah penanamannya meliputi Deli, Serdang, dan Langkat. Seiring dengan pengembangan penanaman itu, luas arealnya bertambah dari 7000 ha menjadi 180.000 ha.¹⁰ Perkembangan perkebunan di Sumatera Timur sangat pesat, pada tahun 1873 di daerah Deli telah tersebar 12 *onderneming* dan sebelum tahun 1891 telah meningkat menjadi 170 buah *onderneming*. Sesudah tahun 1891, jumlah *onderneming* tembakau menurun karena adanya krisis tembakau.¹¹ Areal penanaman tembakau tiap tahunnya kira-kira antara 14.000 ha sampai 20.000 ha. Secara keseluruhan, lahan yang dikuasai perkebunan lebih luas dari itu. Paling tidak, luasnya harus delapan kali luas areal di atas karena penerapan *shifting cultivation* oleh para pengusaha perkebunan tembakau Deli.¹²

¹⁰Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 334

¹¹Mengenai krisis tembakau lebih lanjut baca Thee Kian-wie, *op. cit.*, hlm. 8-12.

¹²*Ibid.*, hlm. 11.

Pembukaan Sumatera Timur (*Ostkust van Sumatra*) menjadi daerah perkebunan yang luas (*cultuurgebied*)¹³ melibatkan kepentingan berbagai pihak baik lembaga pemerintahan, kesultanan, maupun lembaga masyarakat desa umumnya. Keterlibatan beberapa pihak ini terutama berpangkal pada soal penggunaan tanah, yang secara adat adalah milik rakyat dan sultan. Mengingat tanah adalah milik rakyat dan sultan, maka proses pengambilalihan tanah untuk kepentingan perusahaan perkebunan telah menimbulkan keresahan dalam lembaga masyarakat, yang bersangkutan karena dalam banyak kasus sultan memberikan tanah tersebut tanpa bermusyawarah dengan para datuk sebagai kepala kampung di daerah Sumatera Timur.¹⁴

Pemberian tanah konsesi yang demikian luas kepada pihak *onderneming* mengancam keberadaan pertanian rakyat yang masih menggunakan sistem perladangan berpindah. Dahulu, mereka bebas membuka lahan. Namun setelah diperkenalkan sistem pertanian perkebunan, sistem perladangan mulai tergusur karena mereka dilarang membuka hutan sembarangan terutama di tanah-tanah konsesi milik perkebunan. Hal ini mengakibatkan tanaman pangan tradisional mulai di-kesampingkan, akibat lahan pertanian yang semakin hari semakin mengalami penurunan baik luas maupun kualitasnya.

Usaha perkebunan selalu berkaitan dengan masalah tenaga kerja. Tanpa buruh yang cukup, usaha itu tidak akan mendatangkan hasil yang memadai. Tenaga kerja yang diperlukan bukanlah sembarang buruh tetapi buruh yang dapat dibayar dengan gaji rendah karena hanya dengan kondisi seperti itu usaha perkebunan dapat sukses dalam artian ekonomi. Tetapi boleh dikatakan sedikit sekali penduduk Sumatera Timur tertarik untuk menjadi buruh perkebunan. Porsi terbesar dari mereka tidak tertarik untuk melakukan pekerjaan itu, karena mereka telah mempunyai sumber kehidupan dari tanah-tanah yang mereka miliki. Di samping itu umumnya mereka tidak tertarik bekerja dibawah perintah orang lain. Mereka merasa lebih bebas hidup tanpa terikat kerja di perkebunan.¹⁵

Untuk memenuhi masalah buruh di atas, pihak *onderneming* mengambil kebijakan untuk mendatangkan buruh dari luar Sumatera Timur. Akibat langsung dari perkembangan perkebunan di daerah Sumatera Timur itu adalah semakin

¹³Tidak semua wilayah Sumatera Timur dieksploitasi, yang paling banyak adalah bagian utara wilayah ini oleh karena itu Sumatera Timur dibagi menjadi dua yaitu *Cultuurgebied* dan *afdeeling* Bengkalis. *Cultuurgebied* sendiri meliputi wilayah *afdeeling* Langkat, *afdeeling* Deli dan Serdang, *afdeeling* Simalungun dan Tanah karo, dan *afdeeling* Asahan.

¹⁴Diskusi lebih lanjut mengenai hak ulayat dan kedudukan masyarakat tradisional, baca Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Ulayat Suku melayu Atas Tanah Di Sumatera Timur 1800-1975*, (Bandung: Alumni, 1976).

¹⁵Sjafrin Sairin, "Kebijakan Perburuhan di Perkebunan di Sumatera Timur Pada Masa Kolonial", makalah pada *Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora II*, Yogyakarta, Fakultas Sastra, UGM, 26-27 April 1993.hlm. 4.

meningkatnya jumlah penduduk daerah tersebut. Dalam beberapa dekade saja, penduduk daerah ini telah bertambah dengan pesat. Masuknya kuli perkebunan atau buruh impor dari luar telah membawa masalah bagi daerah ini, antara lain masalah pemenuhan kebutuhan pangan akibat meningkatnya daya konsumsi pangan daerah tersebut.

Dari latar belakang di atas akhirnya timbul beberapa permasalahan yang akan memberi arah penulisan ini. Beberapa permasalahan itu adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengaruh perkembangan perkebunan terhadap berbagai perubahan pada masyarakat Sumatera Timur dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Kedua, eksploitasi yang dilakukan pihak *onderneming* terhadap lahan pertanian maupun hutan menyebabkan rakyat tidak bebas lagi membuka lahan pertanian terutama untuk pangan. Bagaimana pihak *onderneming* maupun penduduk setempat memecahkan masalah tersebut. Ketiga, bagaimana pemerintah mengatasi masalah ketersediaan bahan pangan akibat masuknya jumlah buruh perkebunan yang demikian banyak melebihi penduduk setempat.

Sumatera Timur Sampai Awal Abad Ke-20

Seperti pada daerah lainnya di Indonesia pada masa kolonial, Belanda mendasarkan diri pada apa yang disebut dengan *lange verklaring* dan *korte verklarin*. Raja-raja atau kaum bangsawan pribumi mengakui kedaulatan kekuasaan penjajah Belanda, dan sebagai imbangannya mereka dikukuhkan dalam kedudukan sebagai raja atau sultan, atau sebagai penguasa pada kedudukan khusus.

Demikian juga perjanjian kerja sama antara Sultan Ismail dan Residen Riau untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara Sultan dengan penantang-penantangnya. Sultan Ismail dengan Perjanjian Siak (*Traktat Siak*) yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari 1858, menempatkan Siak Sri Indrapura (nama resmi Siak) bersama dengan semua taklukannya yang diperoleh semasa puncak kekuasaannya, menjadi daerah kekuasaan Hindia Belanda.¹⁶

Sumatera Timur pada masa pemerintahan kolonial Belanda terkenal dengan sebutan *Sumatra's Oostkust* atau *Oostkust van Sumatra* yang pada waktu itu terdiri dari *landschap* Siak dan daerah-daerah taklukannya. Dalam perjalanan sejarahnya, Sumatera Timur telah banyak mengalami perubahan status. Pertama ketika Traktat Siak ditandatangani, Sumatera Timur masuk ke dalam *afdeling* Riau. Kemudian tahun 1873, Sumatera Timur menjadi karesidenan dengan pusatnya di Bengkalis. Tahun 1887, pusat karesidenan Sumatera Timur pindah

¹⁶K.J. Pelzer, *Toean Keboen Dan Petani: Politik Kolonial Dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947*, alih bahasa J. Rumbo, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 27.

ke Medan. Pada tahun 1915, statusnya berubah menjadi propinsi, dan akhirnya tahun 1936 statusnya berubah lagi menjadi karesidenan dan bertahan sampai dengan tahun 1942.¹⁷

Dibatasi oleh Aceh di barat laut, Tapanuli di barat daya, Bengkulu di tenggara dan Selat Malaka di timur, luas Sumatera Timur adalah ini 31.715 kilometer persegi atau 6,7 persen seluruh daerah Sumatera. Akan tetapi dari tahun 1870-1942, selama saat terjadinya perubahan bentuk ekonomi secara drastis daerah Bengkulu dikelola sebagai bagian dari daerah ini, sehingga menjadikan "pantai timur" yang terkenal itu suatu daerah administratif seluas 94.583 kilometer persegi atau kira-kira 20 persen dari luas seluruh wilayah pulau Sumatera.¹⁸

Sumatera Timur secara geografis sangat menguntungkan dalam perkembangan ekonomi. Daerah ini mencakup dari dataran pantai ke barat hingga sampai ke dataran berbukit-bukit memanjang dari Aceh Timur, Langkat, Deli, Serdang, Asahan sampai daerah Labuhan Batu. Karena letaknya yang strategis itu, daerah yang terletak antara Sungai Tamiang di utara dan Sungai Barumon di selatan, selama abad ke-17, ke-18, dan paruh pertama abad ke-19 ini menjadi ajang perebutan dua negara besar di Sumatera pada waktu itu, yaitu kerajaan Siak dan Aceh.

Sumatera Timur diapit oleh Selat Malaka dan pantai timur Danau Toba yang mencakup dataran rendah, pegunungan serta dataran-dataran Tinggi Karo dan Simalungun. Banyak sekali dijumpai sungai-sungai yang bermuara ke Selat Malaka. Di sepanjang sungai-sungai itu terutama di muara sungai, tumbuh dengan lebat pohon-pohon nipah dan bakau. Sungai yang berhulu di dataran tinggi Karo dan Simalungun itu membawa sisa-sisa debu halus, pasir serta tanah gembur. Endapan lumpur seluas hampir 30 kilometer bersama-sama rangkaian peristiwa gunung berapi seperti "Tumor Batak" terus berlangsung dan membawa berkah bagi kesuburan tanah di Sumatera Timur, khususnya di sekitar sungai Wampu dan sungai Ular. Keadaan ini telah memberikan keadaan yang sangat khas bagi tanah-tanah ini, yang tidak dijumpai di wilayah-wilayah lainnya. Tanah-tanah di sepanjang pantai timur Sumatera ini menjadi lahan subur untuk pertanian.¹⁹

Sumatera Timur hingga pertengahan abad ke-19 dihuni oleh kelompok etnis Melayu, Batak Karo dan Batak Simalungun. Mereka inilah yang dikenal sebagai penduduk asli Sumatera Timur. Menurut Anderson, masyarakat Islam yang berbahasa Melayu tinggal di bagian-bagian sungai yang lebih hilir. Penduduk disitu merupakan keturunan para imigran Melayu dari Jambi, Palembang dan Semenanjung Malaya dan juga beberapa keturunan Minangkabau, Bugis dan

¹⁷ Edi Sumarno, "Pertanian Karet Rakyat di Sumatera Timur", Tesis S-2, Universitas Gadjah Mada, 1998, hlm. 30-33.

¹⁸ K.J. Pelzer, *op. cit.*, hlm. 31.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32-37.

Jawa yang telah menetap di sepanjang pantai. Pemukiman Batak Karo dan Batak Simalungun lebih mendekat ke hulu. Masyarakat Sumatera Timur sebagian besar hidup dari pertanian, peternakan, perikanan dan hasil hutan.²⁰

Prospek ekonomi Siak dan juga Sumatera Timur tidak terlalu menjanjikan, ketika Belanda berkuasa secara penuh pada tahun 1858. Daerah ini merupakan daerah yang sangat jarang penduduknya, sementara wilayahnya sangat luas. Pertanian sistem tebang bakar atau pertanian ladang berpindah merupakan kebudayaan yang di praktekkan oleh penduduk daerah ini. Tampaknya daerah ini akan dilupakan jika saja tidak terjadi suatu peristiwa pada tahun 1863, yang akan mengubah daerah ini menjadi daerah yang paling diperhatikan oleh pemerintah Belanda bahkan publik dunia.²¹

Ketika perkebunan besar mulai berkembang dengan pesat di Sumatera Timur, perubahan sosial dan ekonomi juga terjadi. Perkebunan yang besar ini sangat membutuhkan tenaga kerja, yang ternyata tidak mampu dipenuhi daerah tersebut, solusinya adalah dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar. Pada awal perkembangannya, para pengusaha *onderneming* mendatangkan buruh dari Cina melalui agen-agen buruh di Semenanjung Malaya. Ketika Nienhuys pertama kali membuka kebun tembakau, ia mempekerjakan 88 orang Cina dan 23 orang buruh Melayu. Buruh Cina dipekerjakan khusus untuk jenis pekerjaan menanam dan menyortir daun tembakau.²²

Kebijakan mendatangkan buruh ini kemudian diikuti oleh pekebun lainnya. Akan tetapi ketika usaha mendatangkan tenaga kerja dari Cina mengalami hambatan karena pembatasan-pembatasan izin yang dilakukan oleh pemerintah Cina, para pekebun mulai melirik Jawa yang pada waktu itu dianggap tempat yang tepat untuk memperoleh buruh yang murah. Rekrutmen tenaga kerja dari Jawa ini dimulai pada tahun 1870-an atas inisiatif agen-agen DPV (*Deli Planters Vereeniging*). Agen-agen tersebut adalah bangsa Eropa, yang dibantu petugas lapangan yang berasal dari Jawa sendiri. Di kalangan orang Jawa, petugas lapangan ini biasa disebut *werek*. Dalam mencari calon buruh yang mau diajak bekerja di Sumatera Timur, para *werek* ini melakukan berbagai cara termasuk membujuk dan menipu calon buruh yang diincarnya.²³

Selain melalui agen, buruh-buruh diperoleh melalui buruh-buruh lama atau *Lao-keh*, yang dikirim pulang ke daerah asalnya oleh perusahaan perkebunan. Mereka ditugaskan untuk membawa buruh-buruh baru dari daerah asalnya.

²⁰ John Anderson, *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*, (New York: Oxford University, 1971), hlm. 117, 279.

²¹ Thee Kian-wie, *op. cit.*, hlm. 4.

²² K.J. Pelzer, *op. cit.*, hlm. 51-54.

²³ Sjafrie Sairin, *op. cit.*, dan juga Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe, Dengan Derita Dan Kemarahannya*, (Medan: Percetakan Waspada, 1977).

Misalnya pada tahun 1910 dikirim 20 *lao-keh* dan yang kembali menjadi 49 orang bertambah dengan orang-orang baru.²⁴

Sebagai akibat sistem rekrutmen ini jumlah buruh yang bekerja di Sumatera Timur semakin banyak dari waktu ke waktu. Pada bulan Mei 1884 misalnya, terdapat sebanyak 27.000 orang buruh Cina dan 1800 orang buruh Jawa yang bekerja di berbagai perkebunan di Sumatera Timur. Pada bulan Mei 1900, jumlah buruh Cina meningkat menjadi 36.509 orang dan buruh Jawa bertambah menjadi 19.223 orang. Pada bulan Mei 1927 jumlah buruh Cina tinggal 28.815 orang (berkurang 21 persen), sedangkan buruh Jawa membengkak menjadi 62.498 orang, termasuk 19.929 buruh wanita.²⁵

Meskipun buruh perkebunan tidak dimaksudkan untuk tinggal dan menetap di perkebunan Sumatera Timur, tetapi jumlah terbesar buruh itu tidak kembali ke kampung halamannya setelah kontrak selesai, terutama orang Jawa. Perkebunan memang memberikan pilihan pada kaum buruh itu, apakah akan pulang ke daerah asal, atau akan memperbaharui kontraknya.²⁶ Namun sebagian besar dari mereka menetap dan berkeluarga serta menurunkan keturunannya di Sumatera Timur, sehingga generasi ini sering disebut dengan "pujakesuma" yang merupakan singkatan dari putera Jawa kelahiran Sumatera atau "jadel" yang artinya Jawa Deli.²⁷

Anderson, yang juga seorang pengamat pertanian yang cermat, memberi gambaran yang jelas tentang kondisi pertanian Sumatera Timur. Di semua tempat yang dikunjunginya, penduduk bertempat tinggal di kampung-kampung yang terletak di tepi sungai yang dapat dilayari sampan-sampan kecil. Orang-orang kampung melakukan cocok tanam perladangan di hutan-hutan yang dibuka sementara, tak jauh dari tepi-tepi sungai.²⁸

²⁴ R. Broersma, "Een Vrije Volksverplaatsing Java-Deli", dalam *Koloniale Studien*, tahun ke-3, jilid 2, tahun 1919, hlm. 171-201. Kantor agen buruh-buruh itu terdapat di beberapa kota di Jawa seperti, Semarang, Magelang, Purworejo, Yogyakarta, dan Bandung. Pelabuhan pemberangkatannya ada di Jakarta, Semarang dan Surabaya.

²⁵ Sjafrie Sairin, *op. cit.*, hlm. 7.

²⁶ Mereka memperbaharui kontrak kerjanya karena beberapa hal antara lain karena adanya kebijakan pemerintah yang disebut dengan *Coeli Ordonantie*, yang di dalamnya terdapat peraturan yang disebut dengan *Poenale Sanctie*. Baca Jan Breman, *Koelies, Planters en Koloniale Politiek*, (Leiden: KITLV, 1992)

²⁷ Widjojo Nitisastro, *Population Trends In Indonesia*, (Ithaca & London: Cornell University Press, 1970), hlm.60. Baca juga tesis Fatimah "Pengaruh Sosial Ekonomis Perkebunan Tembakau Terhadap Masyarakat Sumatera Timur 1863-1900", tesis S-2, Universitas Gadjah Mada, 1985.

²⁸ T. Volkeer, *Van Oerbosch too Cultuurgebied: Een Schets van de Beteekenis van de Tabak, de Andere Cultures, een de Industrie ter Oostkust van Sumatra*, (Medan: DPV, 1928), hlm. 33.

Daerah Sumatera Timur sejak akhir abad ke-17 memiliki dua bentuk pertanian yang berbeda yaitu: *enclave* perkebunan dan pertanian masyarakat di luar *onderneming*. Pada bentuk yang pertama para bangsawan dan penguasa setempat mendapat keuntungan besar karena mereka menerima ongkos sewa tanah. Sementara pada bentuk yang kedua ini masih dibagi menjadi pertanian tanaman pangan dan pertanian tanaman perdagangan. Bentuk pertanian perkebunan di Sumatera Timur mempunyai ciri khusus yaitu: diusahakan dengan skala besar, modal besar di lingkungan sosial dimana tanah masih melimpah dan mudah diperoleh, tetapi tenaga kerja sulit didapat sehingga harus didatangkan dari luar. Pertanian, perikanan dan hasil hutan merupakan mata pencaharian pokok penduduk Sumatera Timur. Tanaman pangan terpenting adalah padi. Namun di beberapa daerah bahan pangan harus didatangkan dari daerah lain. Di Batu Bara misalnya beras harus diimpor dari Kedah dan Asahan.²⁹

Hadirnya perusahaan perkebunan di Sumatera Timur mempengaruhi pertanian tradisional penduduk setempat, karena tanah-tanah mereka telah diambil alih secara semena-mena akibat konsesi-konsesi yang diberikan oleh penguasa pribumi. Sebagai gantinya, petani di daerah ini diizinkan oleh perusahaan perkebunan untuk menggunakan sebagian dari tanah bekas tanaman tembakau untuk menanam tanaman pangan.

Mengiringi keberhasilan usaha perkebunan tembakau di Deli, para pengusaha perkebunan Eropa mulai pula mencoba menanam tanaman keras lain selain tembakau. Mereka mencoba menanam tanaman karet, kelapa, kopi, kelapa sawit dan tanaman lainnya. Usaha ini ternyata mendatangkan keuntungan yang mencengangkan. Karena itu, dari waktu ke waktu jumlah pekebun asing yang membuka usahanya di Sumatera Timur semakin besar. Akibatnya tanah yang dieksploitasi sebagai usaha perkebunan menjadi semakin luas pula dan jumlah buruh pun semakin bertambah.

Eksplorasi Onderneming Terhadap Lahan Produksi

Sumatera Timur yang biasanya dikenal dengan tanah Deli telah lama menempati posisi penting dalam perdagangan di sekitar Selat Malaka, karena hasil-hasilnya seperti lada, kapur barus, gambir. Lada banyak diekspor ke Penang dan Malaka. Sebagai daerah yang subur dan sumber komoditi pada abad ke-18, daerah Sumatera Timur menjadi rebutan bagi kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya seperti Aceh, Siak, Malaka dan Johor. Penghasilan daerah Sumatera Timur sebelum kedatangan para pengusaha swasta Barat dapat dilihat pada Tabel 1. Perkebunan lada yang luas di daerah Sumatera Timur segera lenyap setelah Belanda berkuasa di daerah ini pada awal abad ke-19. Pemerintah kolonial

²⁹ J. Anderson, *op. cit.*, hlm. 279.

berkepentingan untuk membuka daerah ini bagi usaha perkebunan swasta Barat yang menguntungkan.³⁰

Tabel 1
Penghasilan Daerah di Sumatera Timur

No	Daerah	Penghasilan	Keterangan
1.	Langkat	Lada, Rotan, Gambir, Padi, Kayu Abar, Kayu Lakar	Diekspor ke Eropa, Amerika, dan Chili
2.	Sunggal		Tidak kurang dari 20.000 orang Batak Karo bercocok tanam
3.	Bulu Cina	Lada, Gambir	Diekspor ke Penang dan Malaka
4.	Deli	Lada, Padi, Tembakau, Kelapa, Pirang, Kayu, Gambir	Diekspor, hanya padi yang cukup untuk keperluan sendiri
5.	Percut	Lada	
6.	Sungai Tuan	Lada	
7.	Serdang	Lada	Diekspor ke Penang Malaka
8.	Batu Bara	Rotan	
9.	Asahan	Kayu, Padi, Lada	Diekspor
10.	Kualuh	Rotan	Diekspor
11.	Bilah	Rotan	Diekspor
12.	Ponci	Rotan	Diekspor
13.	Siak	Gambir, Sagu	

Sumber : Mahadi Sedikit, *Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur Tahun 1800-1975*, (Bandung:Penerbit Alumnus, 1978) hlm. 24-26.

Sistem perkebunan dan kapitalisme Barat yang diterapkan oleh pemerintah kolonial berdampak besar terhadap perkembangan daerah Sumatera Timur. Selain penetrasi ekonomi kolonial dan kapitalisme sistem perkebunan juga membawa goncangan-goncangan sosial. Hal itu terlihat dari munculnya reaksi-reaksi masyarakat setempat, terutama setelah diperkenalkannya sistem kontrak konsesi yang menyangkut pemilikan tanah penduduk yang dilakukan oleh pihak pengusaha perkebunan dengan sultan. Salah satu reaksi rakyat Sumatera Timur ini tercermin dengan timbulnya perlawanan rakyat Sunggal pada tahun 1872.³¹

Perkembangan perkebunan di Sumatera Timur telah menyebabkan perubahan pada sistem pertanian masyarakat. Masuknya industri perkebunan diterima dengan tangan terbuka oleh para penguasa setempat. Tersedianya tanah yang luas dan penduduk yang jarang mendorong penguasa lokal memberikan konsesi tanah

yang luas kepada perkebunan-perkebunan dengan biaya sewa yang sangat murah. Pihak penguasa setempat menjadikan tanah selayaknya barang dagangan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat dan aturan adat tentang hak penguasaan atas tanah.

Perkebunan tembakau telah menggusur suku Batak, Gayo dan Melayu dari tanah dan hutan yang menjadi hak adat mereka secara turun-temurun. Ini berarti, mereka tidak dapat lagi mengambil kesempatan-kesempatan baru, yakni untuk membuka hutan dan mempunyai ladang huma sendiri. Mereka hanya dapat menggunakan kebun-kebun tembakau yang telah dipanen untuk waktu singkat yaitu satu kali panen saja, yang dikenal dengan sistem jalur.³² Dulu huma yang lama dapat digunakan tidak kurang dari tiga tahun, sedangkan jalur tembakau yang sudah dipanen cuma dapat dipergunakan untuk satu kali panen padi atau jagung. Ini berarti terjadi pembatasan yang serius terhadap aktifitas sistem pertanian dan penduduk yang berada di sekitar konsesi-konsesi perkebunan di Sumatera Timur.

Dengan cara jalur ini para pengusaha terhindar dari kewajibannya menyerahkan tanah cadangannya seluas 4 bau, sehingga mereka dapat menggunakan semua tanah konsesinya untuk menanam tembakau. Penduduk setempat dengan demikian kehilangan keutuhan areal pertaniannya, yang berarti pula penduduk telah kehilangan kekuasaan atas tanahnya.

Kericuhan mengenai penguasaan tanah bagi penduduk segera timbul setelah terjadinya pergeseran penguasaan seperti tersebut di atas. Keadaan ini mungkin tidak akan terjadi apabila sultan sejak semula menentukan secara pasti tanah-tanah mana yang masih dapat dikuasai penduduk. Dengan demikian penduduk masih tetap menguasai tanahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak perlu semuanya diambil oleh pihak perkebunan swasta.³³

Pembagian tanah jalur semakin rumit dengan bertambahnya jumlah penduduk baik secara alamiah maupun akibat migrasi ke dalam daerah perkebunan ditambah lagi dengan desakan buruh perkebunan untuk mendapat jatah tanah jalur. Untuk menangani masalah ini, dibentuk suatu komisi yang bertugas untuk mengawasi masalah pembagiantanah jalur. Dalam tahun 1924 diumumkan kodifikasi yang disebut dengan Peraturan Rakyat Penunggal. Peraturan yang berlaku di daerah Langkat, Deli dan Serdang, memerinci siapa-siapa yang dianggap sebagai penduduk, yang peraturannya berbeda-beda untuk setiap afdeling.³⁴

³⁰ Sartono Kartodirdjo, "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Pada abad ke-19 dan 20", dalam *Lembaran Sejarah*, No. 8, 1972, hlm. 3.

³¹ J. de Ridder, *De Invloed van de Westersche Cultures op de Autochtone Bevolking Ter Oostkust van Sumatra*, (Wegeningen: H. Veenman & Zonen, 1935), hlm. 40-42.

³² K.J. Pelzer, *op. cit.*, hlm. 80 dan juga R. Broersma, *Oostkust van Sumatra: De Ontluiting van Deli*, jilid I, (Batavia: De Javasche Boekhandel & Drukkerij, 1919), hlm. 113.

³³ Fatimah, "Pengaruh Sosial Ekonomis Perkebunan Tembakau Terhadap Masyarakat Sumatera Timur, 1863-1900", tesis S-2. Universitas Gadjah Mada, 1985, hlm. 24.

³⁴ J. de Ridder, *op. cit.*, hlm. 45-46.

Tabel 2
Daftar Perkebunan yang Wajib Memberi Tanah Jaluran

No	Nama Kebun	Nama Konsesi
1.	Medan Estete	Mabar, Deli Tua.
2.	Sampali	Mabar, Deli Tua, Gambang.
3.	Bandar Klipa	Percut, Pem, Kuwis, Amplas.
4.	Mariendal	Amplas, Percut, Pem, Kuwis, Mabar, Deli Tuang, Suka Piring
5.	Helvetia	Helvetia
6.	Raterdam A dan B	Roterdam A dan B, Paya Bakong
7.	Bulu Cina	Bulu Cina
8.	Timbang Langkat	Timbang, Langkat,
9.	Tandem	Tandem, Sei Pakaran, Sei Diski
10.	Tandem Hilir	Tandem, Sei Pakaran, Sei Diski
11.	Tanjung Jati	Tanjung Jati
12.	Padang Brahang	Padang Brahang
13.	Kwala Bagumit	Kwala Bagumit, Lubuk Dalam, Pungei
14.	Kwala Bingei	Kwala Bingei, Kota Lama, Lubuk Dalam
15.	Saentis	Sai Merah, Percut, Sai Mergat
16.	Klumpang	Sunggal A dan B, Germania, Klumpang
17.	Cinta Raja	Cinta Raja
18.	Tanjung Morawa	Tanjung Morawa, Batang Kuis
19.	Tanjung Morawa	Tanjung Morawa, Batang Kuis
20.	Patumbuk	Patumbuk
21.	Kwala Namu	Tumpatan, Rumania A dan B
22.	Pagar Merbau	Lubuk Pakam

Sumber : Mahadi, *op.cit.*, hlm. 145-146.

Pengaruh Perkebunan Tembakau terhadap Ketersediaan Pangan.

Beras adalah tanaman pokok di daerah tropis terutama di Asia Tenggara dan merupakan makanan pokok yang menduduki tempat utama.³⁵ Pertanian padi ada dua macam yaitu pertanian padi kering dan pertanian padi basah. Pada penanaman padi kering orang-orang tidak berusaha menampung air. Pada pertanian padi basah orang-orang berusaha menahan air dengan membuat tanah-tanah bertingkat dan pematang-pematang atau mengalirkan air ke sawah.

Pertanian padi kering adalah yang tertua dan banyak dijumpai di daerah Sumatera Timur. Pertanian ladang ini dilakukan dengan menebang hutan kemudian dibakar. Setelah dibakar bersih, tanah baru bisa ditanami tumbuh-tumbuhan muda seperti padi dan jagung ketika turun hujan. Tahun berikutnya mereka mengulangi hal ini. Setelah dua tahun timbullah rumput-rumputan sehingga harus disiangi, dan karenanya orang lebih suka membuat ladang baru dan meninggalkan ladang

³⁵ K. van den Veer, "Rijst" dalam C.J.J. van Hall dan C. van Koppel, *De Landbouw in de Indische Archipel*, Deel IIA, ('SGravenhage: N.V. uitgeverij W. van Hoeve, MCMXLVIII), hlm. 8.

yang lama. Demikian seterusnya sehingga terjadi pemakaian tanah yang bergilir. Sistem perladangan berpindah atau berhuma ini biasanya terdapat di kawasan tropis. Beberapa ahli mengemukakan tentang ciri-ciri sistem perladangan ini,³⁶ antara lain : teknik pertanian yang sederhana, kepadatan penduduk yang rendah dan berkaitan dengan tingkat konsumsi yang rendah

Pertanian seperti ini hanya bisa dilakukan di daerah yang wilayah hutannya luas dan penduduknya sedikit, maka pertanian ladang dengan pemakaian tanah yang bergilir dapat berjalan dengan abadi. Hutan dan kesuburan tanah dapat pulih dengan sendirinya dalam periode ketika tanah itu dibiarkan dengan tidak ditanami.³⁷

Dari kunjungan John Anderson diketahui bahwa pertanian berhuma adalah sistem pertanian yang berlaku di Sumatera Timur sebelum kehadiran para pengusaha *onderneming*. Padi sawah hanya ditanam di beberapa daerah rawa yang tidak memerlukan perbaikan-perbaikan yang biasanya penting bagi suatu persawahan. Misalnya petak-petak seperti yang terdapat di lembah-lembah sungai dan rawa-rawa air tawar, lebih merupakan sawah "alam" daripada sawah buatan manusia seperti terdapat di Jawa, Minangkabau, dan daerah-daerah yang didiami oleh suku Batak Karo.

Tak ada daerah lain di Indonesia yang pertanian perkebunannya berkembang begitu luas, begitu menguntungkan, namun juga begitu merusak selain di Sumatera Timur, yang berkembang dari daerah yang tidak dikenal menjadi daerah perkebunan ternama di dunia. Tidak ada daerah lain dimana bentrokan antara kepentingan Barat dan kepentingan pribumi terjadi demikian langsung, sedemikian keras dan sedemikian tak terkendali. Tidak ada daerah lain yang memiliki keragaman etnis, perbedaan ideologis dan perbedaan kelas yang berkembang menjadi begitu kusut.³⁸

Sejak Nienhuys pertamakali menanam tembakau tahun 1863 sampai dengan menjelang Perang Dunia II, ketika daerah itu dieksploitasi para pengusaha perkebunan dari Eropa dan Amerika, daerah Sumatera Timur telah berubah. Pada waktu itu lebih dari 60% tanah yang digarap berada di bawah penguasaan orang Barat dan $\frac{3}{5}$ jumlah penduduknya (yang telah menjadi lima kali lipat dari jumlah sebelumnya) adalah orang Jawa dan daerah itu telah menjadi sumber penting pendapatan dari sektor ekspor di kepulauan Indonesia.³⁹

³⁶K.J. Pelzer, *Pioneer Settlement in Asiatic Tropics*, (New York: American Geographical Society, 1945), hlm. 16, dan baca juga Clifford Geertz, *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, terj. S. Supomo, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), hlm. 16.

³⁷ D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, 2 jilid, terj. Pajudi A. (Jakarta: 1970), hlm. 50-52.

³⁸K.J. Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 13.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

ekonomi perkebunan di daerah itu, sedikit banyak hal itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya pendatang asing baik dari daerah lain maupun dari luar negeri. Sebagian besar mereka bermata pencaharian sebagai buruh perkebunan atau sering disebut dengan *kuli kontrak*.

Kebutuhan akan tenaga kerja perkebunan sangat terasa karena berkembangnya dua tipe perkebunan di Sumatera Timur yaitu: perkebunan semusim (*annual*) seperti tanaman tembakau dan perkebunan tahunan atau perkebunan tanaman keras (*perennial*) seperti tanaman karet, teh dan lain-lain. Karena penduduk setempat tidak mau menjadi buruh perkebunan, para pengusaha harus mendatangkan buruh Cina yang didatangkan dari Semenanjung Malaya maupun didatangkan langsung dari daratan Cina dan kemudian para buruh Jawa didatangkan dari Jawa.⁴⁰

Untuk mengatasi berbagai masalah mengenai tenaga kerja, pada tahun 1879 para pengusaha perkebunan mendirikan Perhimpunan Pengusaha-Pengusaha Perkebunan Deli atau *Deli Planters Vereeniging* (DPV). Tujuan DPV ini adalah untuk membahas dan mengatasi berbagai kesulitan pengusaha perkebunan khususnya soal tenaga kerja. DPV ini kemudian mendirikan biro imigrasi, yang bertugas untuk mengurus secara langsung buruh-buruh yang didatangkan dari Cina dan mencakup mengenai seleksi dan pengangkutannya⁴¹. Lihat Tabel 3. Ketika DPV kesulitan merekrut buruh Cina, para pengusaha perkebunan harus memakai sumber tenaga dari Hindia Belanda sendiri. Akhirnya DPV mengambil kebijakan untuk mendatangkan buruh dari Jawa karena penduduk Jawa sangat padat dan dianggap lebih murah daripada harus mendatangkan buruh dari Cina. Maka sejak Perang Dunia I, jumlah buruh Jawa semakin meningkat melebihi jumlah buruh Cina, lihat Tabel 4.

Ekspansi pertanian *onderneming* yang cepat di Sumatera Timur dikatakan unik karena mempunyai pengaruh mencolok terhadap pertumbuhan, penyebaran dan komposisi penduduk. Diperkirakan bahwa sebelum masuknya industri perkebunan jumlah penduduk Sumatera Timur hanya berjumlah kira-kira 150.000 orang.

⁴⁰Thee Kian-wie, *op. cit.*, hlm. 34.

⁴¹*Ibid.*, hlm.35.

Tabel 3
Buruh Imigran Cina dari Cina dan Semenanjung Malaya 1888-1902

Tahun	Buruh Impor		Jumlah
	Dari Cina	Dari Semenanjung	
1888	1.152	2.820	3.972
1889	5.167	3.494	8.670
1890	6.666	2.462	9.128
1891	5.351	1.511	6.862
1892	2.160	109	2.269
1893	5.152	730	5.882
1894	5.607	857	6.464
1895	8.163	2.142	10.305
1896	6.661	559	7.220
1897	4.435	1.384	5.819
1898	5.105	1.424	6.529
1899	7.561	331	7.892
1900	6.922	4	6.926
1901	5.556	20	5.576
1902	7.181	3	7.184

Sumber: Thee Kian-Wie, *op.cit.*, hlm. 36.

Tabel 4
Jumlah Buruh Cina dan Jawa, 1883-1930

Tahun	Cina	Jawa	Jumlah
1883	21.136	1.711	32.847
1893	41.700	18.000	95.700
1898	50.846	22.256	73.102
1900	58.516	25.225	83.741
1906	53.105	33.802	86.907
1913	53.617	118.517	172.134
1916	43.689	150.392	194.081
1920	27.715	209.459	237.174
1925	26.800	108.400	135.200
1930	26.037	234.554	260.391

Sumber: Thee Kian-Wie, *op.cit.*, hlm. 39 dan A. Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan-kerajaan di Sumatera*, terj. Tim PSH. (Jakarta: Sinar Harapan, 1987) hlm. 81.

Dalam tahun 1890, sesudah masuknya buruh imigran terutama dari Cina, jumlah penduduk meningkat menjadi kira-kira 285.000 orang. Tahun 1905, total jumlah penduduk 568.417 orang dan tahun 1913 berjumlah 773.106 orang. Berdasarkan data sensus tahun 1920 (walaupun angka-angkanya tidak lengkap) jumlah penduduk diperkirakan sebesar 1.197.554 orang. Ketika pemerintah melakukan sensus pada tahun 1930, jumlah penduduk semakin meningkat yaitu menjadi 1.673.623. Dari data sensus penduduk tahun 1930 juga terlihat komposisi etnis penduduk Sumatera Timur yang semakin beragam⁴², lihat Tabel 5.

Tabel 5
Susunan Etnik di Sumatera Timur Tahun 1930

Etnik	Banyak	%	Jmlh	%
Eropa	11.079	0,7		
Cina	192.079	11,4		
India Lainnya	18.904	1,1		
Sub Total Non Indonesia			222.805	13,2
Jawa	589.836	35,0		
Batak Toba	74.224	4,4		
Mandailing Angkola	59.638	3,5		
Minangkabau	50.677	3,0		
Sunda	44.107	2,6		
Banjar	31.266	1,9		
Aceh	7.795	0,5		
Lain-lain	24.646	1,5		
Sub Total Kaum Pendatang			882.189	52,3
Melayu	334.870	19,9		
Batak Karo	145.429	8,6		
Batak Simalungun	95.144	5,6		
Lain-lain	5.436	0,3		
Sub Total Pribumi			580.879	35,5
Jumlah Total			1.685.873	100

Sumber : Anthony Reid, *op.cit.*, hlm. 85.

Sementara kepadatan penduduk per kilometer persegi rata-rata 17,9 per kilometer. Akan tetapi di daerah pusat perkebunan seperti Deli Serdang, Langkat, Simalungun dan Tanah Karo, tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi. Heterogenitas etnik ini menimbulkan persolan sosial dan hukum, yang menyangkut penguasaan atas tanah, yang secara tradisional telah dikuasai oleh etnik tertentu atau kelas sosial tertentu. Sementara itu, pertambahan jumlah penduduk yang

tergantungan pada tersedianya bahan pangan di pasaran, semakin memperbesar jumlah kebutuhan pangan yang harus disediakan, lihat Tabel 6.

Tabel 6
Kepadatan Penduduk Sumatera Timur Tahun 1930

Afdeeling	Jumlah Penduduk	Luas Lahan Km2	Jumlah Penduduk per Km2
Deli Serdang	518.632	4.840	107,2
Langkat	255.484	6.336,29	40,3
Simalungun dan Tanah Karo	372.013	1.500	57,4
Asahan	333.763	13.330	25
Bengkalis	192.927	64.493,95	3,1
TOTAL	1.673.623	95.500,24	17,9

Sumber : D.G., Stibbe (et.al), *Encyclopedia van Nederlandsche Indie* (Leiden: N.V.V/H E.J. Brill s'Gravenhage Martinus Nijhoff, 1919) dan J. de Ridder, *De Invloed van de Westersche cultuures op de autoctone bevolking ter Oostkust van Sumatera*, (Wageningen: H. Veeman & Zonen, 1935) hlm. 37-38.

Pada awal abad ke-19, beras sudah merupakan bahan pangan pokok bagi bagian terbesar penduduk Sumatera Timur. Dengan berkembangnya usaha perkebunan seperti yang telah disebutkan diatas, naik pula konsumsi beras, seiring dengan jumlah buruh yang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Di Sumatera Timur penduduk pribumi mulai meninggalkan pertanian tradisional mereka di tengah pertumbuhan perkebunan yang demikian pesatnya. Industri perkebunan yang merupakan usaha berskala besar sangat padat modal dan memerlukan jumlah buruh yang banyak untuk satu unit produksi. Mereka umumnya pekerja yang tidak membutuhkan ketrampilan khusus, seperti pekerjaan menyortir daun tembakau.⁴³

Sementara itu penanaman padi yang dilakukan penduduk lokal tidak mampu mengikuti perkembangan jumlah buruh yang pesat itu. Sejak tahun 1870, semakin banyak jumlah beras yang diimpor dari Indocina, Siam, Burm. Selain itu ada juga beras yang didatangkan dari Aceh dan Jawa. Menurut salah satu data yang tersedia impor beras ke Sumatera Timur pada tahun 1885 tercatat 240.000 pikul atau sekitar 8,6 ton.⁴⁴ Jumlah impor beras ini meningkat menjadi sekitar 191 ton pada tahun 1930.

Sesudah tahun 1890 impor beras Hindia Belanda semakin meningkat, diatas 100.000 ton. Jumlah impor beras yang sedemikian tingginya ini berpengaruh terhadap harga beras di Indonesia dan internasional. Sumatera Timur

⁴² D.G.Stibbe, et. al., *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, (Leiden: N.V.H./E.J. Brill s'Gravenhage Martinus Nijhoff, 1919), hlm. 290-291.

⁴³Thee Kian-wie, *op. cit.*, hlm. 70.

⁴⁴R.Broersma, *op. cit.*, hlm. 116. Satuan 1 pikul sama dengan 61,761 kilogram.

merupakan daerah yang sangat kontras. karena semua produksi daerah ini ditujukan untuk ekspor, dan sebaliknya semua konsumsi harus diimpor. Memang penduduk memproduksi beras tetapi produksi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Sehingga dalam komposisi impor daerah Sumatera Timur, beras menduduki tempat pertama dalam kategori barang-barang konsumsi.

Tabel 7
Impor Beras Luar Negeri Sumatera Timur 1885-1940 (dalam Kg)

Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
1885	8.646.540	1925	119.136.367
1886	15.000.000	1926	122.307.984
1908	65.000.000	1927	167.371.568
1911	81.057.529	1928	170.126.171
1912	89.447.369	1929	171.361.434
1913	98.569.643	1930	191.027.212
1914	117.084.682	1931	150.625.868
1915	98.642.336	1932	125.326.689
1916	126.764.175	1933	130.877.475
1917	146.425.685	1934	133.267.251
1918	137.393.836	1935	143.805.186
1919	83.285.150	1936	104.970.537
1920	76.270.551	1937	87.627.287
1921	97.850.698	1938	170.463.329
1922	114.232.377	1939	144.244.548
1923	105.266.526	1940	32.068.558
1924	96.441.589		

Sumber : Data tahun 1911-1940 di kutip dari Edy S, "Pertanian Karet Rakyat Sumatera Timur 1863-1942" Thesis S2 UGM 1998, hlm. 224. Data tahun 1885 dari Broersma, *De Ontluiking van Deli*, hlm. 116. Data tahun 1886 dan 1908 dari T. Volker, *van Oerbosch tot Culturgebeid*. Hlm. 69.

Tabel 7 memperlihatkan angka impor beras Sumatera Timur dari tahun 1885 sampai tahun 1940. Sementara mengenai produksi pangan lokal tidak ada catatan lengkap, hanya ada sedikit perkiraan yang dilakukan oleh *Handelsvereniging van Medan* yaitu tahun 1932 dan 1933. Itupun dihitung dari total konsumsi beras dikurangi impor beras. lihat tabel 8. Karena produksi pangan lokal yang dipakai sangat jarang maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah impor beras dapat disamakan dengan jumlah pemakaian atau konsumsi daerah tersebut.

Daerah Sumatera Timur, meskipun terkenal ke seluruh dunia sebagai penghasil produk ekspor pertanian, tetapi daerah ini menjadi daerah paling rawan dalam masalah pangan di Hindia Belanda. Produk pangan setempat tidak dapat mencukupi keperluan penduduk desa pribumi sendiri. Permasalahan rawan pangan ini berhubungan dengan masalah tanah untuk penduduk setempat. Banyak penduduk

desa terutama yang tinggal di daerah-daerah perkebunan tembakau seperti, di Langkat, Deli dan Serdang, tidak mempunyai cukup tanah yang dapat ditanami padi untuk memenuhi kebutuhan beras mereka sendiri. Sistem jaluran yang diperkenalkan oleh perkebunan, hanya mampu memenuhi kebutuhan para penggarapnya, sedangkan penduduk yang tinggal di daerah perkebunan tanaman keras tidak mengenal sistem jaluran sehingga mereka sangat tergantung pada beras yang ada di pasaran. Sementara itu penduduk setempat umumnya lebih tertarik menanam tanaman perdagangan seperti karet daripada menanam padi, karena hasilnya lebih menguntungkan.

Tabel 8
Produksi, Konsumsi dan Impor Beras Sumatera Timur Tahun 1932-1933

Konsumsi, Impor, dan Produksi Beras	1932	1933
Konsumsi beras buruh perkebunan 200.000 X 230 Kg 175.000 X 230 Kg	46.000 Ton	40.250 Ton
Konsumsi beras penduduk Sumatera Timur 1.300.000 X 135 Kg	175.000 Ton	175.000 Ton(+)
Total Konsumsi	221.500 Ton	215.250 Ton
Impor Beras	125.000 Ton	131.000 Ton (-)
Produksi Beras di Sumatera Timur	96.000 Ton	84.250 Ton

Sumber: Thee Kian Wie, *op.cit.*, hlm. 166.

Mengalirnya pekerja dan naiknya jumlah penduduk, terutama yang berkaitan dengan migrasi dari berbagai tempat di Sumatera serta terjadinya proses pengkotaan mengakibatkan kekurangan beras semakin terasa. Seperti para pekerja yang telah disebutkan diatas, penduduk perkotaan yang semakin banyak, juga sangat tergantung pada beras impor.⁴⁵ Dengan keadaan ini tidak mengejutkan kalau daerah Sumatera Timur disebut sebagai daerah rawan pangan atau defisit pangan terbesar. Hal ini tidak hanya karena besarnya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor non-pangan tetapi juga karena tidak adanya cukup lahan untuk memproduksi bahan pangan sesuai dengan kebutuhan penduduk.

Hal di atas berkaitan dengan kebijakan pemerintah kolonial terhadap perkembangan perkebunan, yang tidak diimbangi dengan kebijakan penyediaan bahan pangan yang mampu dipenuhi sendiri. Pemerintah dan para pengusaha perkebunan hanya memikirkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hanya sebagian dari keuntungan itu digunakan untuk mengimpor kebutuhan bahan pangan.

Dalam usaha mengatasi masalah kekurangan bahan pangan diberlakukan beberapa kebijakan, seperti usaha pengalihan lahan. Di perkebunan yang tanah

⁴⁵K.J. Pelzer, *op. cit.*, hlm. 148 dan Thee Kian-wie, *op. cit.*, hlm. 111.

konsesinya banyak tidak dimanfaatkan. pemerintah mengambil kebijakan untuk menghapuskan tanah jaluran dan mengalihkan tanah-tanah tersebut kepada para petani untuk dimanfaatkan dan ditanami tanaman pangan. Untuk itu didirikan Biro Pengalihan pada bulan Oktober 1935. Tanah yang dialihkan ini haruslah dalam keadaan baik, dan dipakai untuk pengembangan pertanian permanen yang diharapkan berhasil dalam waktu singkat. Dengan sistem pertanian seperti ini maka hasil-hasil yang memadai bisa dikembangkan. Suatu majalah bulanan diterbitkan oleh *Landbouwoorlichtingsdienst* di Siantar dengan nama *Penjoeloeh Tani* yang berisi tentang penyuluhan dan memberikan metode bertani kepada masyarakat.⁴⁶

Pada tahun 1917 dimulai percobaan pembukaan lahan persawahan di daerah Sisir Gunting yang terletak di sebelah barat laut kota pelabuhan Belawan, dan kemudian dibuka lagi di Sungai Percut. Gubernur Sumatera Timur memerintahkan untuk membuka suatu kawasan perkampungan pertanian (kolonisasi) di suatu daerah seluas 3000 ha yang dianggap cocok untuk penanaman padi. Perkampungan ini banyak dihuni oleh orang-orang Banjar, mereka menerima lahan seluas 2 ha, seperempat digunakan untuk pengembangan pekarangan dan tiga perempat digunakan untuk penanaman padi.⁴⁷

Selain menjadi petani penduduk daerah ini juga tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang di perkebunan. Selama tiga tahun Sisir Gunting tumbuh dengan subur. Ketika impor beras semakin meningkat setelah tahun 1920 sehingga perhatian pemerintah maupun pemukin Banjar mulai memudar dan beberapa tahun kemudian pemukiman ini ditinggalkan penduduknya yang kembali bekerja sepenuhnya di perkebunan-perkebunan tembakau dan lebih suka menerima tanah jaluran. Proyek Sisir Gunting ini menjadi bukti nyata keengganan penduduk pribumi terhadap pengembangan tanah pertanian sawah, karena mereka mempunyai hak menggunakan tanah tembakau yang sudah dipanen.

Disamping kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan diatas, usaha untuk mengatasi kekurangan pangan dilakukan melalui peraturan wajib tanam. Kebijakan ini ditempuh pemerintah sebagai upaya darurat yang dilakukan antara tahun 1939 sampai tahun 1941 dalam rangka mengantisipasi Perang Pasifik yang ada tanda-tanda akan meletus. Peraturan ini menyerukan untuk dilakukan intensifikasi pertanian pangan dan membuka seluas-luasnya tanah konsesi untuk para petani agar dipakai untuk perluasan tanaman pangan. Buruh-buruh perkebunan dan bahkan petani yang memerlukan tanah yang tinggal di luar perkebunan didorong untuk menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, dan singkong diatas tanah yang telah dilepaskan itu. Pada tahun 1939 industri tembakau telah

melepaskan lahan seluas 13.500 ha tanah kosong, setelah peristiwa Pearl Harbour dan melepaskan lagi 26.000 ha sehingga menjelang tahun 1942 sejumlah 40.000 ha tanah milik onderneming dilepaskan untuk produksi pangan.

Kesimpulan

Perkembangan industri perkebunan yang pesat di Sumatera Timur membawa dampak yang besar terhadap daerah ini baik positif maupun negatif. Sistem pertanian perkebunan yang represif dan ekstensif telah membawa dampak yang merugikan bagi daerah ini. Sistem perkebunan yang ekstensif baik modal maupun tenaga kerja menjadikan daerah Sumatera Timur sebagai daerah yang perkembangan penduduknya sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia selain Jawa. Sebelum kedatangan para pengusaha perkebunan asing, Sumatera Timur adalah kampung halaman orang Melayu, Batak Karo dan Batak Simalungun. Kedatangan Nienhuys telah merubah semua ini, penguasa-penguasa setempat dengan sukarela memberikan konsesi kepada pengusaha asing untuk dijadikan perkebunan. Hak mereka atas tanah yang secara turun temurun menjadi miliknya secara semena-mena diberikan kepada pengusaha asing. Lahan produksi penduduk pribumi dilanggar dan dikuasai secara sepihak tanpa persetujuan mereka. Mereka harus rela menerima tanah jaluran untuk pertanian pangan mereka tanpa mampu mengembangkan panen baru dan itupun waktunya sangat terbatas. Penduduk pribumi yang dulu telah menanam tanaman perdagangan seperti lada dan pala ikut serta menanam tanaman karet. Kesempatan ini hanya dinikmati oleh daerah-daerah yang dipergunakan untuk perkebunan tanaman keras seperti di Asahan dan Labuhan Batu sedangkan penduduk daerah tembakau tidak dapat menikmatinya. Tanaman karet ternyata menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan tanaman pangan hal ini membuat mereka enggan menanam tanaman pangan sehingga kebutuhan akan lahan pangan terutama beras harus diimpor.

Kedatangan buruh yang demikian banyak mempengaruhi tingkat konsumsi beras di daerah ini menjadikan daerah ini daerah defisit pangan terbesar di Hindia Belanda. Untuk memecahkan defisit pangan pemerintah dan pengusaha perkebunan menerapkan kebijaksanaan impor beras, kemudian meningkatkan produksi lokal sehingga tidak tergantung pada beras impor dengan berbagai cara diantaranya dengan pengalihan lahan, pembukaan sawah percontohan di Sisir Gunting dan Sungai Percut dan usaha yang terakhir adalah Peraturan Wajib Tanam yang merupakan tindakan darurat dalam menghadapi Perang Pasifik. Namun semua usaha ini sia-sia dan Sumatera Timur tetap terpuruk dalam menghadapi masalah defisit pangan ini sampai bala tentara Jepang menduduki wilayah ini pada tahun 1942 dengan meletusnya Perang Dunia II.

⁴⁶Kroniek 1937, *Oostkust van Sumatra Instituut, Mededeelingen No. 27*, hlm. 118.

⁴⁷K.J. Pelzer, *op. cit.*, hlm. 143.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. *Mission To the East Coast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971.
- Booth, Anne, ed. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Broersma, R. *Oostkust van Sumatra: De Onthuing van Deli*. Batavia: Javasche Boekhandels & Drukkerij, 1919.
- _____. "Een Vrije Volksverplaatsing Java-Deli", *Koloniale Studien*, tahun ke-3 jilid 2, tahun 1919.
- Burger, D.H. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. 2jilid, terj. Prajudi A. Jakarta: Pradnja Paramita, 1960.
- Bussy, J.H. *Kroniek, tahun 1927-1937*. Amsterdam: Oostkust van Sumatra Instituut, 1928-1938.
- Djoko Suryo dan Sartono K. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Eddy Sumarno "Pertanian Karet Rakyat di Sumatera Timur 1863-1942", *tesis S-2*. UGM, 1998.
- Fatimah. "Pengaruh Sosial Ekonomis Perkebunan Tembakau Terhadap Masyarakat Sumatera Timur 1863-1900". *tesis S-2*. UGM, 1985.
- Geertz, C. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Terj. S. Supomo, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.
- Hall, C.J.J dan Koppel, J. *De Landbouw in de Indische Arhipel*. deel II A, s'Gravenhage: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, MCMXLVIII.
- Kian-wie, Thee. *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra 1863-1942*. Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1977.
- Mahadi, Sedikit. *Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur 1800-1975*. Bandung: Alumni, 1978.
- Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe Dengan Derita dan Kemarahannya*. Medan: Percetakan Waspada, 1977.
- Pelzer, K.J. *Pioneer Settlement in The Asiatic Tropics*. New York: American Geographical Society, 1945.
- _____. *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria Di Sumatera Timur 1863-1942*. terj. J. Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- _____. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. terj. Bosko Carvalho, Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Ridder, J de. *De invloed van de Westershe Cultures op de Autochtone Bevolking ter Oostkust van Sumatra*, Wegeningen: H. Veenman & Zonen, 1935.
- Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 2 jilid, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Stibbe, D.G. et. al. *ENI*, Leiden: Martinus Nijhoff, 1919.
- Volker, T. *Van Oerbosch tot Cultuurgebied: Een Schets van de Beteekenis van de Tabak, de Andere Cultures, en de Industrie ter Oostkust van Sumatra*, Medan: DPV, 1928.
- Wertheim, W.F. *Indonesia Society in Transition: A Study of Social Change*, Bandung: W. van Hoeve, 1956.
- Widjojo Nitisastro. *Population Trends in Indonesia*. London/Ithaca: Cornell UP, 1970.